

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan suatu daerah yang nyata, maka pemerintah melakukan suatu perencanaan realisasi pendapatan daerah. Pemerintah Kota Semarang terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang nyata salah satunya dengan cara pengembangan aplikasi online serta bekerja sama dengan berbagai macam e-commerce untuk melakukan pembayaran pajak, sehingga dengan cara ini dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran pajak, selain itu juga pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dalam kesadarannya membayar pajak daerah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mudah memahami dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajaknya. Adapun beberapa perkembangan penerimaan target dan realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan selama tahun 2015-2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1.1 Perkembangan Penerimaan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang

Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2015-2019 dalam tugas akhir ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari Badan Pendapatan asli Daerah Kota Semarang, yaitu tentang keuangan yang memuat

pendapatan daerah kota semarang. Berikut merupakan target dan realisasi pajak daerah Kota Semarang tahun 2015-2019

Table 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Semarang

Tahun 2015-2019

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Persentase (%)
2015	215.000.000.000	207.949.314.778	88%
2016	241.875.000.000	251.480.179.393	87%
2017	330.000.000.000	348.112.863.646	92%
2018	348.500.000.000	410.101.969.206	70,38%
2019	425.000.000.000	489.950.873.453	68%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2019

Dari table 4.1 dapat dilihat bahwa pendapatan daerah di Kota Semarang setiap tahunnya meningkat dan beberapa tahun diantaranya melebihi target yang telah ditetapkan, namun persentase realisasi pada tahun 2017 mengalami fluktuatif serta dapat dilihat persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan tahun 2015 88% atau (207.949.314.778), tahun 2016 87% atau (251.480.179.393), tahun 2017 memperoleh 92% atau (348.112.863.646), tahun 2018 70,38% atau (401.101.969.206) serta pada tahun 2019 68% atau (489.950.873.453).

4.2 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak air tanah, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak galian C, pajak parkir pajak rokok, serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Setiap jenis pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan serta memberikan penerimaan kepada daerahnya. Khususnya pajak bumi dan bangunan memiliki peranan yang penting dalam pembangunan Kota Semarang, walaupun pajak bumi dan bangunan sempat mengalami fluktuatif. Namun setelah itu, Pajak bumi dan bangunan kembali mendapatkan kenaikan pendapatan dari yang ditargetkan pada tahun 2018, pemerintah Kota Semarang mendapat PAD dari sektor PBB sebesar Rp 410 M. (semarangkota.go.id) . Adapun beberapa faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya.

4.3 Faktor Penghambat yang Dihadapi BAPENDA Kota Semarang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam melakukan upaya serta kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, BAPENDA Kota Semarang pernah mengalami berbagai kendala dalam mencapai tujuan. Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang menghambat tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Semarang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis

dengan Bapak Agus selaku kepala POS Pelayanan PBB Wilayah IV Kota Semarang, beberapa faktor yang menghambat penerimaan pajak bumi dan bangunan kota semarang :

1. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajibannya secara tepat waktu

Tabel 4.2

Data Wajib Pajak Tahun 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH WAJIB PAJAK	JUMLAH PEMBAYARAN
1	Pedurungan	12	61.170	32.109.556.549
2	Tembalang	12	65.774	24.314.204.647
3	Banyumanik	11	46.785	45.605.829.132
4	Semarang Selatan	10	16.179	25.116.810.440
5	Ngaliyan	10	50.575	31.062.504.086
6	Semarang Timur	10	18.851	16.822.942.911
7	Semarang Utara	9	28.225	17.186.429.958
8	Gajahmungkur	8	16.101	37.247.172.320
9	Candisari	7	16.083	22.121.232.767
10	Gayamsari	7	15.901	10.385.617.771
11	Tugu	7	10.724	12.884.386.183
12	Semarang Barat	16	38.891	36.364.585.708
13	Gunungpati	16	44.606	9.646.726.667
14	Semarang Tengah	15	18.510	67.307.562.395
15	Mijen	14	34.753	14.354.470.970
16	Genuk	13	35.913	15.544.502.205
JUMLAH		177	519.041	418.072.534.709

Sumber : BAPENDA Kota Semarang, 2019

Dari data di atas kepala bidang POS PBB Pajak Daerah wilayah IV Bapenda Kota Semarang, mengatakan bahwa wajib pajak yang telah tercatat dari 16 kecamatan Kota Semarang baru sekitar 70% warga wajib pajak yang telah mematuhi kewajibannya, hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, masyarakat rendah atas kepatuhan kewajibannya dikarenakan minimnya informasi yang diketahui tentang ketepatan membayar pajak.

2 Tingginya tarif pajak yang diberikan sehingga masyarakat yang tergolong kurang mampu tidak dapat membayar pajak secara tepat waktu

Dalam hal ini terdapat tarif pajak yang mengalami kenaikan cukup tinggi sehingga sedikit memberi kendala terhadap wajib pajak dalam melakukan kewajibannya, hal ini dibuktikan dengan adanya tekanan inflasi sehingga mengakibatkan penurunan pajak pendapatan bumi dan bangunan sebesar 0,81% , Pemkot Kota Semarang menaikkan tarif karena selama ini penerimaan pendapatan kota Semarang selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. Contohnya tahun 2017 target realisasi untuk pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar Rp 335.000.000.000, dan realisasi yang telah tercapai sebesar Rp 347.735.689.081 atau 103,91% dari target, maka dilihat dari hasil penerimaan pajak tersebut pemerintah ingin menaikkan tarif pajak.

Namun karena adanya kenaikan ini pemerintah tidak memperhatikan dari segi pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi lebih terbebani dalam membayar kewajibannya.

4.4 Upaya yang Dilakukan BAPENDA Kota Semarang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Semarang merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab pengelolaan sumber-sumber asli pendapatan Kota Semarang dan menangani segala bentuk permasalahan yang berhubungan dengan Pendapatan Daerah Kota Semarang, termasuk pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan diperoleh dari 16 kecamatan yang tercatat dalam data Wajib Pajak. Saat ini PBB merupakan salah satu primadona dalam sektor pajak.

Oleh karena itu BAPENDA Kota Semarang berusaha semaksimal mungkin dalam upaya mencapai tujuannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut BAPENDA melakukan beberapa upaya diantaranya :

1. Bapenda mengoptimalkan wajib pajak yang belum taat dalam membayar kewajibannya
2. Bapenda menerapkan sistem bulan bebas dari denda pajak
3. Memberikan kompensasi kepada wajib pajak jika NJOP nya diatas Rp 130juta

4. Bapenda memanfaatkan teknologi yang canggih serta pada tahun 2018 pemkot Kota Semarang menurunkan tarif pajak 40% agar masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu BAPENDA juga mengadakan gebyar pajak daerah sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu serta memberikan keringanan denda untuk pajak non PBB dan BPHTB (semarangkota.go.id).

Berdasarkan opini penulis, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh BAPENDA dalam mengatasi faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang ialah :

1. Mengembangkan kembali sistem pembayaran yang digunakan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih modern sehingga dapat mengurangi jumlah objek dan wajib pajak yang belum terdaftar atau mengindar dari kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Melakukan pembinaan serta pelatihan terhadap SDM agar dapat melakukan pemeriksaan pajak secara optimal dan bila perlu dapat dilakukan perekrutan SDM baru untuk menambah jumlah petugas di lapangan.
3. Mempercepat proses administrasi khususnya dalam penerbitan SKPD /SKPDKB dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak.
4. Meningkatkan sistem pengawasan dengan melakukan kontrol langsung dari pihak pimpinan atau kepala bidang mulai dari proses pendataan

objek dan wajib pajak Bumi dan Bangunan hingga proses pelunasan pajak.

4.5 Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kota Semarang Tahun 2015–2019

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Daerah. Selain PAD, terdapat komponen yang lainnya seperti Dana Perimbangan serta Pendapatan Daerah Lain-Lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sektor pajak daerah. Sektor pajak daerah sendiri terdiri dari 11 jenis mata pajak, salah satunya yaitu pajak Bumi dan Bangunan. Dalam pembahasan berikut ini akan diuraikan kontribusi pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang selama tahun 2015–2019.

Tabel 4.3
Kontribusi Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Realisasi PAD
Tahun 2015–2019

Tahun	Target	Realisasi Pokok	Persentase (%) PBB terhadap PAD
2015	215.000.000.000	207.949.314.778	101%
2016	241.875.000.000	251.480.179.393	107%
2017	330.000.000.000	348.112.863.646	105%
2018	348.000.000.000	410.101.969.206	119,96%
2019	425.000.000.000	489.950.873.453	113%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang, 2019

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa target penerimaan realisasi pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan hal ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian target realisasi yang telah di capai. Kontribusi pajak bumi dan bangunan cukup memberikan dampak yang besar dalam pembangunan Kota Semarang hal ini dapat dilihat dari persentase pajak daerah terhadap PAD berada dalam kisaran angka 100% maka ini menunjukkan bahwa kontribusinya dikatakan sudah cukup baik. Oleh karena itu BAPENDA Kota Semarang dapat lebih lagi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang sektor PBB dalam meningkatkan PAD bagi Pemerintah Kota Semarang.